

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus dugaan korupsi di sektor energi, khususnya di lingkungan Pertamina, telah menjadi isu yang berulang dalam pemberitaan media nasional. Korupsi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara dunia bisnis dan politik di Indonesia. Fenomena korupsi di Indonesia sendiri merupakan masalah struktural yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, infrastruktur hingga energi. *Transparency International* dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sering menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang masih perlu mendapatkan perhatian serius (Nurrohmah & Setiawati, 2025).

Penelitian Alifia & Widyaningsih menjelaskan bahwa korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Alifia & Widyaningsih, 2023), korupsi juga dapat menghalangi pemenuhan hak asasi manusia dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Inayah, 2022). Namun, efektivitas pemberantasannya masih relatif stagnan. Data IPK terbaru yang dirilis pada Februari 2025 menunjukkan skor IPK Indonesia tahun 2024 sebesar 37 dari 100, naik dari 34 pada tahun sebelumnya, dengan peringkat 99 dari 180 negara. Meskipun mengalami peningkatan, skor tersebut masih menandakan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan belum tertangani secara menyeluruh (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Dari sisi efektivitas penegakan hukum, laporan Rule of Law Index 2021 yang dikeluarkan oleh The World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat 98 dari 139 negara dalam indikator bebas korupsi dengan skor 0,40. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, semakin mengkhawatirkan kondisi korupsi di suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara lebih tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (CNNIndonesia, 2021).

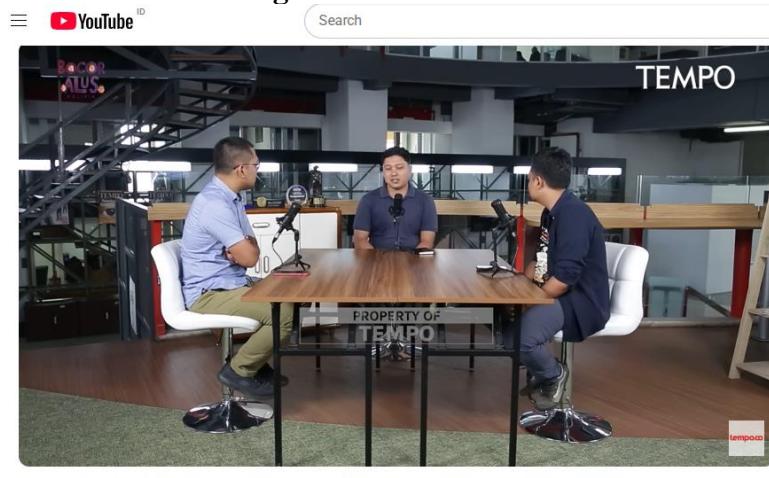
Selain peran APH, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga sangat krusial untuk menciptakan mekanisme check and balances. Partisipasi publik dalam mengontrol kinerja penegak hukum sangat diperlukan guna memastikan transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Peran serta masyarakat dalam pengawasan ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan pengawasan publik serta pemberian penghargaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi PP 43/2018 (Anandya et al., 2022).

Dalam sektor energi, praktik korupsi sering melibatkan pengusaha dan elite politik yang memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun (Kompas.com, 2025). Kasus ini kembali memunculkan nama Muhammad Riza Chalid, pengusaha yang dikenal

sebagai “Saudagar Minyak” yang diduga memiliki jaringan bisnis dan politik kuat dalam sektor migas, termasuk melalui keterlibatan anaknya dalam skema impor minyak (Merdeka.com, 2025).

Penggeledahan ini dilakukan setelah anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) yang menjabat sebagai *Beneficial Owner* PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai salah satu tersangka (voi.id, 2025). MKAR diduga berperan sebagai perantara dalam memenangkan tender impor minyak mentah, yang menjadi bagian dari skema korupsi yang merugikan negara. Perkembangan media digital menghadirkan ruang baru dalam produksi dan pertarungan wacana politik, termasuk wacana tentang oligarki.

Gambar 1. 1 Podcast Bocor Alus Politik - Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid



(Sumber:Youtube Tempo.co)

Salah satu medium yang menonjol adalah podcast politik investigatif. Podcast Bocor Alus Politik produksi Tempo.co, khususnya episode “Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid”, menarasikan kasus korupsi migas

tidak sebagai persoalan hukum individual, tetapi sebagai bagian dari struktur kekuasaan oligarkis yang bekerja secara sistemik (Tempo.co, 2025). Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Mohammad Riza Chalid, seorang pengusaha yang kerap dijuluki “Saudagar Minyak” atau “The Gasoline Godfather” pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung menggeledah kediaman dan kantor Riza Chalid di Jakarta terkait penyidikan kasus korupsi tersebut (Merdeka.com, 2025). Penggeledahan ini dilakukan setelah anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai salah satu tersangka (voi.id, 2025). MKAR diduga berperan sebagai perantara dalam memenangkan tender impor minyak mentah, yang menjadi bagian dari skema korupsi yang merugikan negara.

Jeffrey Winters, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, mengemukakan bahwa runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya era Reformasi tidak secara otomatis menghapus praktik oligarki politik, melainkan justru menunjukkan keberlangsungan dan transformasi oligarki dengan diferensiasi aktor serta katalisatornya. Winters mendefinisikan oligarki sebagai bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok elite kecil yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, serta cenderung memengaruhi kebijakan negara, lembaga atau BUMN demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Konstelasi ini mencerminkan praktik politik oligarkis karena terdapat kolaborasi tersembunyi antara pengusaha dan aktor negara yang mempertahankan dominasi elite dengan mengabaikan kepentingan publik (Fachrudin, 2025).

Penelitian Budi (2024) berjudul “Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia” menunjukkan bahwa oligarki tetap bertahan dalam sistem demokrasi melalui dominasi elite ekonomi politik dalam pembentukan kebijakan hukum. Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek struktural dan belum mengkaji representasi praktik oligarki dalam wacana media, khususnya media digital (Budi, 2024).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Leerssen (2025) artikel dalam Sage Journals yang berjudul *“From Murdoch to Musk: Platform Ownership and the Political Economy of Online Content Governance”*, menunjukkan bahwa ruang publik digital semakin dipengaruhi oleh kepentingan oligarkis melalui struktur kepemilikan platform yang memungkinkan pemilik mengendalikan kebijakan konten dan arah wacana publik (Leerssen, 2025).

Namun, kedua penelitian tersebut belum mengkaji representasi politik oligarki dalam wacana media digital berbasis audio visual seperti podcast. Podcast investigatif memiliki karakter dialog dan naratif yang berbeda dari teks berita konvensional serta berpotensi membentuk pemahaman politik publik yang lebih kritis. Merujuk pada keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempati posisi yang berbeda melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengungkap bagaimana politik oligarki direpresentasikan secara implisit dalam wacana media digital, khususnya melalui podcast Bocor Alus Politik episode “Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid” yang diproduksi oleh Tempo.co, penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang mengkaji relasi antara bahasa, kekuasaan, ideologi dan struktur sosial dalam konstruksi realitas media (Thabranji, 2022).

Podcast politik di media digital Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari podcast berbasis opini, wawancara hingga jurnalisme investigatif. Podcast dalam kanal Ferry Irwandi dikenal sebagai ruang diskursus politik kritis yang menekankan argumentasi, refleksi normatif dan penyampaian sikap politik secara eksplisit dari host. Melalui format monolog maupun dialog dengan narasumber, podcast ini berperan penting dalam membangun kesadaran politik publik dan mendorong partisipasi warga dalam isu-isu demokrasi dan kebijakan publik (Budiman, 2025). Sementara itu, program Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab merupakan contoh jurnalisme investigatif berbasis talk show yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk mengungkap persoalan kekuasaan, kebijakan negara dan kepentingan publik melalui interaksi langsung di ruang diskusi (Narasi Tv, 2025).

Di tengah keragaman format tersebut, podcast Bocor Alus Politik produksi Tempo.co dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakter produksi wacana yang berbeda. Podcast ini disusun melalui diskusi redaksional antarjurnalis yang berangkat dari kerja jurnalistik investigatif, penelusuran data, serta pembacaan jaringan aktor dan relasi kuasa di balik peristiwa politik. Narasi yang dibangun tidak bergantung pada opini personal host maupun pernyataan narasumber secara langsung, melainkan pada analisis kolektif redaksi terhadap fakta, dokumen, dan konteks politik-ekonomi yang melingkupi suatu kasus. Karakter ini memungkinkan

representasi praktik politik oligarki disampaikan secara implisit dan struktural dalam wacana media.

Berdasarkan karakter tersebut, Bocor Alus Politik dipandang relevan sebagai objek penelitian Analisis Wacana Kritis karena menyediakan ruang untuk mengkaji bagaimana politik oligarki dikonstruksi, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui bahasa, struktur narasi, serta konteks sosial dalam media digital berbasis podcast. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami representasi kekuasaan dan relasi elite dalam kasus dugaan korupsi sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan jaringan politik dan ekonomi pada PT Pertamina (Persero).

Pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dipilih karena memungkinkan analisis yang komprehensif melalui tiga dimensi yaitu struktur teks, kognisi sosial jurnalis dan redaksi, serta konteks sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi (Prihartono & Suharyo, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis wacana politik oligarki dalam pemberitaan kasus Pertamina dan jaringan politik Riza Chalid melalui podcast Bocor Alus Politik YouTube Tempo.co, guna membangun pemahaman kritis masyarakat terhadap praktik oligarki serta pentingnya transparansi dan pemberantasan korupsi dalam institusi negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana politik oligarki dalam podcast Bocor Alus

Politik “Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid” di YouTube Tempo.co berdasarkan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana politik oligarki dalam kasus pertamina dan jaringan politik Riza Chalid yang ditinjau melalui wacana kritis Teun A. Van Dijk dalam podcast Bocor Alus Politik di Youtube Tempo.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk dalam menganalisis wacana politik oligarki pada kasus Pertamina dan jaringan Riza Chalid. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu komunikasi dengan menunjukkan media mengonstruksi wacana kritis dan menggunakan bahasa untuk membentuk opini publik serta relasi kekuasaan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian di bidang studi media, jurnalisme investigatif dan komunikasi politik terkait representasi kasus korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi jurnalis dan podcaster dalam membangun pemberitaan yang lebih transparan dan kritis terhadap relasi kuasa. Temuan ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan lembaga antikorupsi sebagai acuan dalam merancang komunikasi publik yang

lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam membaca isu korupsi dan oligarki sehingga media tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana membangun kesadaran publik.